



**RILIS**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR-RI**  
**KE PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024-2025**  
**TANGGAL 6-10 DESEMBER 2024**

Dalam rangka memastikan dan meningkatkan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. Kunjungan Kerja ini dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan program mitra kerja di daerah yang sumber dananya dari APBN.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kunjungan kerja baik dalam pertemuan, kunjungan lapangan dan menerima aspirasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. BNPB meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan mitigasi potensi bencana di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan mempersiapkan dengan baik pelaksanaan penyelenggaraan haji di wilayah Sumut.
- b. Kementerian Sosial melakukan sinergi dengan Dinas Sosial Sumut untuk mengelola bantuan sosial secara terorganisir dan merapihkan data agar bantuan sosial tepat sasaran.
- c. Kementerian Sosial meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bisa meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan.
- d. Sinergi Baznas RI dan Baznas Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan nilai pengelolaan zakat. Bisa dilakukan dengan dua cara yakni mendorong secara paksa melalui Undang-Undang serta meningkatkan sosialisasi partisipasi masyarakat agar lebih pro aktif dan memahami peran Baznas.

- e. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *responsive* terhadap masalah aktual terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara ditangani secara serius.

### **Rekomendasi**

Pada kunjungan kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merekomendasikan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak BNPB meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan mitigasi potensi bencana di wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan mempersiapkan dengan baik pelaksanaan penyelenggaraan haji di wilayah Sumut.
2. Komisi VIII mendesak Kementerian Sosial melakukan sinergi dengan Dinas Sosial Sumut untuk mengelola bantuan sosial secara terorganisir dan merapihkan data agar bantuan sosial tepat sasaran.
3. Komisi VIII mendukung Kementerian Sosial meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas bisa meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan.
4. Komisi VIII mendorong Baznas RI dan Baznas Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan nilai pengelolaan zakat. Bisa dilakukan dengan dua cara yakni mendorong secara paksa melalui Undang-Undang serta meningkatkan sosialisasi partisipasi masyarakat agar lebih pro aktif dan memahami peran Baznas.
5. Komisi VIII meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *responsive* terhadap masalah aktual terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Utara ditangani secara serius.

Medan, 10 Desember 2024

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI